



Foto: Canva



Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Gagalnya Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara

Desember 2025

infid.org



Analisis Ringkas INFID #4

BENCANA BUKAN TAKDIR:
BANJIR SUMATERA DAN GAGALNYA
NEGARA MENJAMIN HAK AMAN
WARGA NEGARA

Penulis:

Bona Tua, Deputi Direktur INFID

Siti Khoirun Ni'mah, Direktur Eksekutif INFID

infid.org

Tulisan ini adalah bagian dari upaya advokasi **#CloseTheGap** untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Advokasi ini dituangkan melalui narasi-narasi kritis berbasis bukti mengenai isu ketimpangan di Indonesia. Harapannya, kajian singkat ini bisa berguna sebagai bahan kampanye, pemahaman bersama, atau poin-poin diskusi di antara staf INFID, anggota, dan jaringan.

Tulisan ini **boleh dikutip** dalam riset atau dokumen lainnya.

Ilustrasi banjir bandang
Foto: Canva



RINGKASAN

Analisis ini disusun berbasiskan pada kajian dan pandangan anggota INFID, sekaligus dihubungkan dengan berbagai laporan global, termasuk laporan terbaru mengenai ketimpangan global 2026. Laporan menyoroti tingginya korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, serta lambatnya penanganan korban bencana. Oleh karena muncul desakan menaikkan status bencana ke bencana nasional, yang hingga kini tidak ada tanggapan dari pemerintah. Laporan juga menggarisbawahi mengenai problem struktural Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam yang bukan hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, melainkan juga melebarnya jurang ketimpangan.



Keterangan: Ilustrasi deforestasi (Foto: Canva)

I. Kondisi Bencana

Banjir dan longsor terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar, hingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)[1] mencatat jumlah korban meninggal 1.090 orang dengan 186 jiwa masih hilang dengan 147,236 rumah rusak.

Berawal dari hujan yang terus menerus sejak 25 hingga 25 November 2025, membawa curah hujan di atas 100 mm per hari terjadi di wilayah Sumatera Barat. Hujan yang dipengaruhi oleh siklon langkah yaitu Siklon Senyar, sedang terjadi di sekitar Selat Malaka. Pada tanggal 25 November 2025, hujan ekstrem, lebih dari tiga kali lipat kekuatan hujan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, terjadi di Aceh. Hujan membawa air yang menimbulkan banjir bandang di tiga provinsi sekaligus.

Sampai tulisan ini disusun, ribuan warga masih terisolasi tanpa akses logistik, layanan kesehatan, air bersih, listrik, dan sanitasi layak. Kondisi di tiga provinsi menunjukkan akses wilayah terputus, distribusi bantuan tersendat, pengungsian tidak manusiawi, dan kelompok rentan seperti bayi, anak, perempuan, lansia, serta penyandang penyakit kronis paling terdampak. Kondisi di tiga provinsi menunjukkan akses wilayah terputus, distribusi bantuan tersendat, pengungsian tidak manusiawi, dan kelompok rentan seperti bayi, anak, perempuan, lansia, serta penyandang penyakit kronis paling terdampak.

Flower Aceh[2] mendesak agar perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Hal ini berdasarkan pada kondisi di lapangan lapangan masih kritis dengan banyak daerah terisolasi, kebutuhan dasar seperti air bersih, pangan, dan layanan kesehatan reproduksi belum terpenuhi, dan distribusi logistik terganggu. Flower Aceh juga menerima laporan risiko tambahan terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan dan kesulitan akses layanan kesehatan.

[1] Berdasarkan data BNPB per 20 Desember 2025

[2] Merujuk pada Siaran Pers Flower Aceh di <https://dialeksis.com/hankam/flower-aceh-desak-perlindungan-khusus-perempuan-dan-anak-di-lokasi-bencana/>

Desakan kepada pemerintah untuk menetapkan status bencana menjadi bencana nasional terus mengemuka, salah satunya yang disampaikan oleh Posko Nasional untuk Sumatera[3] yang terdiri dari 21 organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional, menyusul penanganan yang dinilai lamban, tidak memadai, dan berpotensi menjadi pelanggaran kemanusiaan skala besar. Penetapan Status Bencana Nasional dipandang mendesak untuk membuka mobilisasi sumber daya maksimal, termasuk bantuan internasional, alat berat, dan transportasi udara, serta memperkuat koordinasi pusat–daerah sesuai mandat UU 24/2007 dan PP 21/2008.

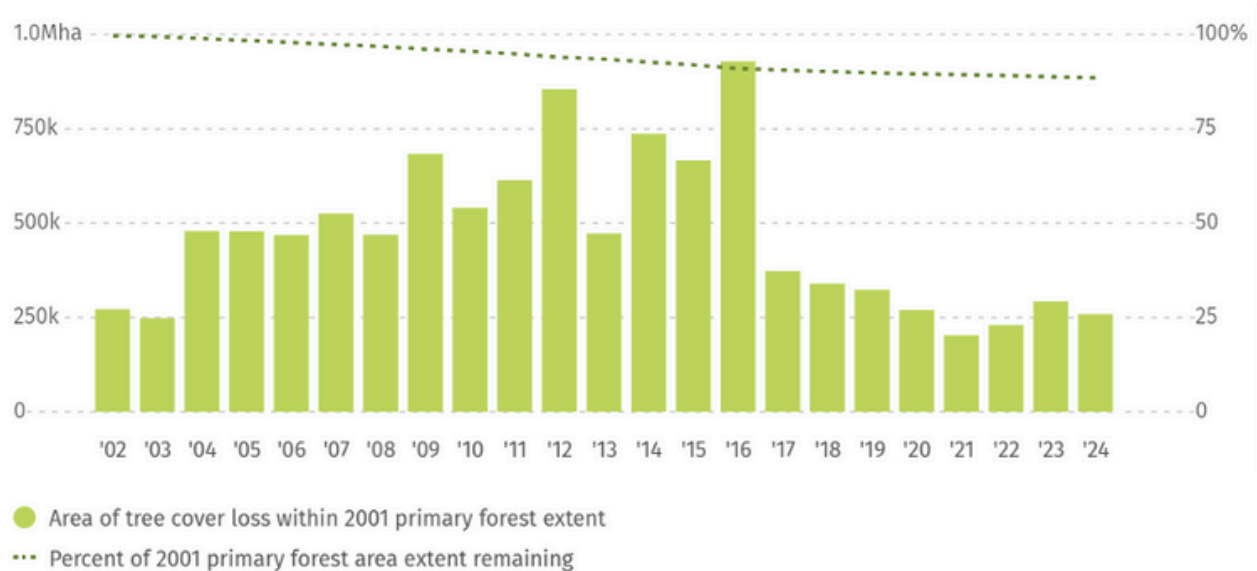
II. Kegagalan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan bencana alam biasa, melainkan bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Menurut WALHI[4], terjadi deforestasi sekitar 1,4 juta hektar hutan sepanjang 2016–2025 di tiga provinsi tersebut akibat aktivitas ratusan perusahaan, yang merusak daerah aliran sungai (DAS) penting di bentang Bukit Barisan seperti Ekosistem Batang Toru di Sumatera Utara, DAS Krueng Trumon, Singkil, Peusangan, dan Tripa di Aceh, serta DAS Aia Dingin di Sumatera Barat. Kerusakan hutan di wilayah hulu DAS secara signifikan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memperparah banjir bandang dan longsor.

[3] Merujuk pada siaran pers YLBHI di [Berdasarkan data BNPB per 20 Desember 2025](#)

[4] Merujuk pada siaran pers WALHI di <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>

Tingginya laju deforestasi di Indonesia telah menjadi perhatian dari Global Forest Watch (GFW, 2025)[5]. GFW mencatat dari tahun 2002 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer lembab, yang berarti sekitar 34% dari total kehilangan tutupan pohon di Indonesia pada periode yang sama berasal dari hutan primer. Dalam kurun waktu tersebut, luas hutan primer lembab Indonesia menyusut sekitar 11%, menunjukkan bahwa hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi dan fungsi ekologis paling penting, seperti penyerap karbon, pengatur tata air, dan penyangga kehidupan masyarakat, terus mengalami degradasi dan konversi dalam skala besar. Ini mencerminkan tekanan serius dari deforestasi jangka panjang yang berdampak langsung pada krisis iklim, hilangnya biodiversitas, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Berikut adalah data laju deforestasi di Indonesia.



Sumber: Global Forest Watch (2025)

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM, 2025)[6] bersama dengan jaringan masyarakat sipil menegaskan bahwa bencana ini merupakan pertanda terjadinya krisis agraria dan ekologis yang telah lama berlangsung, dipicu oleh pembagian izin dan konsesi besar-besaran untuk perkebunan, tambang, dan kehutanan yang merampas hutan alam serta wilayah adat, merusak fungsi hidrologis kawasan hulu, dan meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Data menunjukkan ribuan konflik agraria dalam satu dekade terakhir, dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat termasuk provinsi dengan konflik tertinggi, serta deforestasi masif di Tapanuli Selatan dan Tengah yang berkorelasi dengan ekspansi sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan.

[5] Laporan Global Forest Watch di link berikut <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>

[6] Rilis KSPPM bersama jaringan masyarakat sipil di [iii] Merujuk pada siaran pers YLBHI di Berdasarkan data BNPB per 20 Desember 2025

Perluasan kebun sawit merupakan salah satu factor penyebab tingginya deforestasi. Menurut Stockholm Environment Institute (SEI, 2024)[7], selama 20 tahun terakhir, perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia, menyumbang sekitar sepertiga atau sekitar 3 juta hektare dari total kehilangan hutan alam tua. Meskipun dalam satu dekade terakhir Indonesia menunjukkan pembalikan tren deforestasi untuk produksi sawit, di mana pada periode 2018–2022 deforestasi akibat sawit industri turun menjadi sekitar 32.406 hektare per tahun, atau 18% dari puncaknya pada 2008–2012. Namun pada tahun 2022, kembali terjadi peningkatan deforestasi berbasis sawit industri sebesar 18%.

III. Sumber Daya Alam Sebagai Sumber Ketimpangan

World Inequality Report 2026[8] mencatat ketimpangan global masih sangat tinggi dan bahkan meningkat. Kekayaan dan pendapatan dunia terpusat di segelintir orang dimana 10% terkaya menguasai sekitar 75% dari total kekayaan global, sementara 50% terbawah hanya memiliki sekitar 2% kekayaan. Laporan ini juga menyoroti ketimpangan antar negara dan wilayah, dengan pendapatan rata-rata di negara kaya jauh lebih tinggi daripada di negara berpenghasilan rendah, serta adanya ketidaksetaraan gender, di mana perempuan secara global memperoleh jauh lebih sedikit pendapatan daripada laki-laki akibat perempuan banyak menanggung kerja tidak berbayar. Selain itu, ketimpangan berkaitan dengan krisis iklim, karena kelompok terkaya juga bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca, sementara kelompok termiskin paling menderita akibat perubahan iklim.



Keterangan: Ilustrasi petani perempuan. (Foto: Canva)

[7] <https://www.sei.org/features/indonesian-palm-oil-exports-and-deforestation/>

[8] World Inequality Report 2026 merupakan sebuah laporan global mengenai ketimpangan yang disusun oleh World Inequality Lab dengan lebih dari 200 peneliti.

Laporan juga menyoroti ketimpangan di Indonesia yang menyebutkan 10% penduduk terkaya menerima sekitar 46% dari total pendapatan nasional, sementara 50% penduduk termiskin hanya menerima sekitar 14%. Perbandingan pendapatan antara 10% teratas dengan 50% terbawah relatif melebar dari tahun 2014 ke 2024. Keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia meningkat sedikit, tetapi masih relatif rendah, yang mencerminkan ketimpangan gender yang persisten dari tahun ke tahun.

Kelapa sawit merupakan salah sumber kekayaan dari orang-orang terkaya di Indonesia. Laporan Palm Oil Magazine (2024) menyebutkan[9] beberapa pengusaha yang terlibat dalam bisnis perkebunan kelapa sawit masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia per Mei 2024 menurut majalah Forbes dan Bloomberg. Di antara daftar orang terkaya ini, tiga tokoh memiliki kepentingan besar dalam industri sawit, antara lain Budi Hartono dan Michael Hartono yang menjalankan usaha kelapa sawit melalui PT Hartono Plantation Agro di Kalimantan Barat, serta Anthoni Salim yang melalui Salim Group memiliki perusahaan sawit besar seperti Indofood Agri Resources, PT Salim Ivomas Pratama, dan PT PP London Sumatra Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa industri minyak sawit bukan hanya komoditas penting bagi Indonesia, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap akumulasi kekayaan konglomerat nasional.



Keterangan: Ilustrasi hamparan kebun sawit. (Foto: Canva)

[9] <https://www.palmoilmagazine.com/hot-news/2024/06/17/palm-oil-owner-among-top-10-richest-indonesians-as-of-may-2024/>

IV. Hilangnya Hak Aman Akibat Buruknya Pengelolaan Bencana di Indonesia

Bencana seakan telah menjadi kalender rutin di Indonesia. Hampir tiap tahun kita menyaksikan putaran peristiwa yang sama: banjir menelan permukiman, tanah longsor merenggut nyawa, angin puting beliung menyapu atap rumah, dan gempa bumi mengguncang wilayah-wilayah yang sebenarnya telah lama diperingatkan sebagai zona rawan. Dalam setiap tragedi, kita selalu mendapati negara hadir: tenda darurat berdiri, dapur umum beroperasi, tentara dan relawan berjibaku menyelamatkan warga. Namun, di balik semua aksi cepat itu, sebuah pertanyaan fundamental jarang disentuh secara jujur di ruang publik: seberapa kuat sebenarnya kemampuan keuangan negara dalam menghadapi bencana yang datang berulang kali dan semakin besar? Hal ini penting karena Negara wajib memberikan hak atas aman kepada warga.

Data APBN menunjukkan gambaran yang belum menggembirakan. Anggaran BNPB pada 2023 sebesar sekitar Rp 5,48 triliun dan pada 2024 sekitar Rp 5,14 triliun. Pada saat yang sama, total belanja negara adalah sekitar Rp 3.061,2 triliun pada 2023 dan Rp 3.325,1 triliun pada 2024. Artinya, porsi anggaran BNPB hanya berada di kisaran 0,15–0,18% dari belanja negara. Pemerintah memang menambahkan dana cadangan bencana di APBN yang nilainya sekitar Rp 3–4 triliun per tahun. Jika digabung, maka total pendanaan eksplisit kebencanaan pusat, yaitu BNPB dan dana cadangan bencana, hanya berada di kisaran 0,20–0,25% dari belanja negara. Untuk negara dengan tingkat risiko tinggi, populasi tinggi dan frekuensi kejadian besar setiap tahun, rasio ini tampak sangat kecil.

[9] <https://www.palmoilmagazine.com/hot-news/2024/06/17/palm-oil-owner-among-top-10-richest-indonesians-as-of-may-2024/>

Sering disampaikan bahwa pendanaan bencana tidak bisa hanya dihitung dari anggaran BNPB. Banyak kementerian juga membiayai program mitigasi seperti pembangunan tanggul, rehabilitasi daerah aliran sungai, reboisasi hutan, pembangunan rumah tahan gempa, serta berbagai program perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko iklim. Pemerintah daerah pun mengalokasikan belanja tak terduga dari APBD untuk bencana. Semua itu benar. Namun justru di situ letak masalah baru: Indonesia tidak memiliki satu angka nasional yang pasti tentang total belanja pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Anggaran tersebut tersebar tanpa penandaan khusus, sehingga publik, DPR, maupun masyarakat sipil tidak pernah benar-benar tahu berapa total investasi keselamatan publik dari bencana yang dilakukan negara setiap tahun. Akibatnya, isu pendanaan bencana selalu tampak kecil di permukaan meskipun sebenarnya berserak di banyak sektor. Tanpa data terintegrasi yang transparan, sulit bagi publik untuk menuntut peningkatan porsi anggaran secara rasional.

Dalam konteks inilah pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menjadi tonggak penting. Skema ini menempatkan dana khusus sekitar Rp 7,3 triliun, yang berasal dari Rp 3,0 triliun APBN 2022 dan Rp 4,3 triliun APBN 2023, sebagai dana mirip *endowment*. Dana pokok tidak langsung dibelanjakan, melainkan diinvestasikan, sementara hasil investasinya digunakan untuk pembiayaan kesiapsiagaan, mitigasi, dan transfer risiko termasuk asuransi Barang Milik Negara. Dari sisi desain, mekanisme ini cukup modern dan progresif. Negara tidak lagi hanya mengandalkan belanja tahunan, melainkan mulai membangun bantalan keuangan jangka panjang khusus untuk bencana.

Masalahnya terletak pada skala. Dengan pokok dana Rp 7,3 triliun, PFB hanya setara sekitar 0,24% belanja negara 2023 atau sekitar 0,035% PDB nasional. Karena hanya hasil investasi yang dapat digunakan, nilai yang benar-benar bisa mengalir setiap tahun tentu masih jauh lebih kecil dari dana pokok tersebut. Dalam situasi bencana lintas provinsi berskala besar seperti Sumatera 2025, dana ini tidak akan mampu menjadi tulang punggung pembiayaan. Ia masih berada pada posisi sebagai pelengkap, bukan pilar utama pendanaan. Keberadaannya sangat menjanjikan secara konsep, tetapi belum mampu menjawab tantangan secara praktis.

Jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia kian terlihat konservatif. Di negara kawasan ASEAN, Filipina mengalokasikan National Disaster Risk Reduction and Management Fund yang nilainya mencapai sekitar 0,54% dari total anggaran nasional 2024, di luar dana tanggap cepat di setiap kementerian.

Anggota G20 dan OECD yang sebaya Indonesia seperti Meksiko, ketika masih mengoperasikan FONDEN, mewajibkan secara hukum alokasi minimal 0,4% dari anggaran federal setiap tahun khusus untuk dana bencana. Di Jepang pascatsunami dan gempa 2011, anggaran rekonstruksi mencapai sekitar 13% dari total belanja negara 2012. Contoh Jepang memang ekstrem, tetapi memberi sinyal jelas bahwa keselamatan warga bisa ditempatkan sebagai prioritas fiskal nomor satu ketika kondisi menuntut. Indonesia, dengan alokasi eksplisit 0,25–0,30%, berada jauh di bawah praktik tersebut.



Keterangan: Ilustrasi bencana banjir. (Foto: Canva)

REKOMENDASI

1

Menaikkan status bencana alam di Sumatera dan Aceh sebagai bencana alam nasional. Namun kenaikan status ini tetap dengan menempatkan kepemimpinan local. Sehingga kenaikan status ini akan memberi ruang untuk rekonstruksi dan rehabilitasi lebih besar dengan dukungan dari internasional. Indonesia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengelolaan bencana berbasis pada kepemimpinan lokal terutama actor-aktor kemanusiaan termasuk kepemimpinan perempuan di Sumatera dan Aceh.

2

Pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selama ratusan tahun ekonomi Indonesia tumbuh dari komoditas berbasis lahan. Struktur yang menjadi warisan kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini. Struktur ekonomi ini rentan karena tidak sanggup memberikan manfaat lebih bagi perekonomian nasional, juga berpotensi merusak lingkungan dan menghilangkan hak masyarakat atas sumber daya alam yang dimilikinya. Jika Indonesia tidak mampu melakukan transformasi struktur perekonomian untuk keluar dari ketergantungan atas sumber daya alam, maka potensi konflik dan bencana akibat rusaknya alam kian tidak terhindarkan.

3

Pentingnya negara memiliki sistem pembiayaan yang kuat untuk mitigasi dan response bencana. Beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia meliputi:

Pertama, pemerintah dan DPR perlu menyepakati target minimal nasional pendanaan bencana, misalnya menaikkan porsi belanja kebencanaan eksplisit menjadi sedikitnya 0,50% dari belanja negara, baik melalui penguatan BNPB, dana cadangan, maupun belanja pencegahan lintas sektor yang diberi penandaan khusus. Angka ini bukan untuk disakralkan, melainkan sebagai sinyal politik bahwa keselamatan warga merupakan prioritas fiskal.

Kedua, skala Dana Abadi Bencana (PFB) perlu ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai Rp 50–100 triliun dalam 5–10 tahun ke depan. Dengan dana pokok sebesar itu, imbal hasil investasi tahunan akan jauh lebih signifikan dan mampu membiayai program mitigasi skala besar, mendukung perlindungan sosial adaptif, serta memberikan suntikan cepat bagi pemulihan pascabencana tanpa harus menunggu perubahan APBN.

Ketiga, negara perlu membangun sistem *budget tagging* pengurangan risiko bencana di seluruh APBN dan APBD. Dengan sistem ini, seluruh belanja terkait pencegahan dan adaptasi—baik di Kementerian PUPR, KLHK, Kemensos, maupun pemerintah daerah—dapat dihimpun dan dilaporkan sebagai satu angka nasional. Transparansi ini memungkinkan pengawasan publik sekaligus perbandingan internasional yang lebih objektif.

Keempat, mekanisme akses dana darurat perlu disederhanakan. Indikator objektif seperti jumlah korban, luas wilayah terdampak, dan nilai perkiraan kerusakan harus menjadi *trigger* otomatis pencairan berbagai instrumen pendanaan, tanpa perlu perdebatan panjang mengenai status administrasi.

Pada akhirnya, pendanaan bencana adalah soal hak warga atas keselamatan. Setiap anak yang bersekolah di wilayah rawan longsor berhak mengetahui bahwa negara telah menginvestasikan dana yang cukup untuk melindunginya. Setiap keluarga di bantaran sungai berhak atas pencegahan banjir yang bukan sekadar program insidental, melainkan komitmen fiskal jangka panjang. Bencana bukan semata takdir alam; ia adalah refleksi pilihan politik.

TENTANG INFID

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

Media Sosial:

-  **Instagram:** infid_id
-  **Twitter:** infid_id
-  **Facebook:** Infid
-  **Linked In:** Infid
-  **YouTube:** INFID TV
-  **Website:** www.infid.org





NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

.....
Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

